

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI SIDIK JARI (*FINGER PRINT*) DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
HILDA NUNUNG
NIM. E42012022

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : nununk.hilda@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan absensi sidik jari (*finger print*) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau yang belum berjalan optimal melalui faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi dan Faktor Struktur Birokrasi menurut Edward III. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian yakni Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Staf di Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Tenaga kontrak di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dan Kepala Bidang Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau serta Kepala Sub Bidang Disiplin di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau.

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yakni implementasi kebijakan absensi sidik jari (*finger print*) di sekretariat daerah kabupaten sanggau sudah berjalan efektif, namun sumber daya manusianya yang belum memadai dan disposisi sikap pelaksana yang masih kurang dalam pengimplementasian kebijakan absensi sidik jari (*finger print*) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Absensi

Abstract

This thesis aims to identify the factors causing implementation of fingerprint attendance policy in Regional Secretariat of Sanggau County has not been optimal through communication factor, resource factor, disposition factor, and bureaucratic structure factor based on Edward III's theory. This research using descriptive study with qualitative method. The subjects of this research are head of general and civil servants division in Regional Secretariat of Sanggau County, head of general and civil servants sub division in Regional Secretariat of Sanggau County, contract servants in Regional Secretariat of Sanggau County and head of discipline division of Regional Civil Servants of Sanggau County further head of discipline sub division of Regional Civil Servants of Sanggau County.

The conclusion are the implementation of fingerprint attendance policy in Regional Secretariat of Sanggau County has been running effectively, but there is still not enough human resource and lack of disposition executor attitude in implementing fingerprint attendance policy in Regional Secretariat of Sanggau County.

Keywords : Implementation, Policy, Attendance.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sejak bulan Maret 2014 dengan adanya himbauan surat keputusan Bupati Nomor: 840/209/BKD-TUK dalam poin ke 8, bahwa guna efektivitas pelaksanaan pembinaan penegakan disiplin dan menaati jam masuk kerja, dimintakan agar SKPD/Unit kerja yang belum menggunakan perangkat absensi elektronik untuk segera menyediakan perangkat dimaksud dengan tujuan untuk mempermudah melakukan perhitungan terhadap tingkat kehadiran PNS dan CPNS secara akurat di lingkungan masing-masing. Dengan tujuan agar meningkatkan disiplin pegawai agar menaati peraturan jam masuk kerja diimbangi dengan terciptanya peningkatan kualitas sumber daya pegawai. Serta dalam poin 7 dikatakan bahwa salah satu indikator kedisiplinan PNS dan CPNS tergambar dari ketaatan terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, maka diminta kepada seluruh SKPD secara berjenjang melakukan pembinaan disiplin dan pengawasan melekat bagi seluruh Pegawai di lingkungan kerja.

Oleh karena itu peningkatan kualitas Pegawai dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, karena dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik, maka perlu adanya penyatuan arah dan pandangan diri pegawai pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi pemerintah secara terpadu.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin canggih tentunya akan lebih mempermudah seseorang dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Secara umum sistem absensi Sidik Jari bertujuan sebagai upaya penertiban pegawai sesuai maksud dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional. Sasaran dari pengembangan kualitas sumber daya pegawai adalah untuk

meningkatkan kinerja operasional pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Dari hasil observasi pendahuluan yang penulis lakukan di lokasi penelitian selama melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPK) di lingkungan Sekretariat daerah Kabupaten Sanggau semua Aparatur Sipil Negara maupun tenaga honorer melakukan absensi setiap hari, baik itu waktu masuk maupun pulang, namun ada sebagian dari pegawai tersebut setelah melakukan absensi mereka tidak langsung melakukan aktivitas sesuai dengan tupoksinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan pulang kerumah dan mengantar anak kesekolah dan meninggalkan kantor terkadang pegawai tidak izin terlebih dahulu kepada atasan. Sehingga bila pegawai lain atau atasan membutuhkan pegawai tersebut, akan sulit mencarinya dan pekerjaan kantor menjadi tertunda dan terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Kondisi demikian memang sangat disayangkan dikarenakan pegawai yang seharusnya langsung melakukan aktivitas pekerjaannya justru melakukan kegiatan diluar tugas dan melupakan tanggungjawabnya, ini tidak terlepas dari kurang sadarnya

sebagian pegawai tersebut terhadap kedisiplinan serta rasa tanggungjawab dimana yang seharusnya kepentingan-kepentingan tersebut haruslah dikalahkan.

Sehubungan dengan hal di atas ternyata fasilitas yang canggih dan lengkap belum merupakan jaminan akan berhasilnya suatu organisasi tanpa diimbangi oleh kualitas manusia yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Dari statement diatas, jelaslah betapa pentingnya peranan dan kedudukan pegawai sebagai unsur pelaksana kegiatan pemerintahan.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di latar belakang dan fokus penelitian diatas, adapun rumusan permasalahan penelitian ini adalah mengapa Implementasi Kebijakan Absensi Sidik Jari (*Finger Print*) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau belum optimal?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan absensi Sidik

Jari (*Finger Print*) melalui empat faktor, yakni; faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor sikap pelaksana, dan faktor struktur di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.

Pemerintahan pada khususnya dan Ilmu Sosial pada umumnya.

B. TEORI DAN METODOLOGI

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu: Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini, dan Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu Pemerintahan khususnya Sebagai bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dapat meningkatkan kinerja pegawai.
- b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dalam memperkaya bahan referensi ilmiah di Bidang Ilmu

1. Teori Konsep Implemetasi Kebijakan Absensi Sidik Jri (*finger print*) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.

1). Menurut Ifa H. Misbach (2010;47) sidik jari merupakan struktur Genetika dalam bentuk rangka yang sangat detail dan tanda yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat dihapus atau diubah. Sidik jari ibarat barcode diri manusia yang menandakan tidak ada pribadi yang sama. Sidik jari bersifat spesifik, permanen serta mudah diklasifikasikan.

2). James E. Anderson (dalam Subarsono, 2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan aparat pemerintah. Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli, kebijakan publik merupakan suatu pemecahan masalah dari pemerintah dalam menyikapi permasalahan yang ada, maka dikeluarkanlah suatu kebijakan publik yang harus dijalankan agar tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada akan tercapai.

3). Edwards III (1980:9), mengemukakan :”*in our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask; what are the precondition for successful policy implementation?*” setidaknya Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik akan ditentukan oleh banyak faktor-faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Komunikasi (*Communication*),

Keberhasilan implementasi ditunjukkan dengan pribadi implementornya mengetahui apa yang harus dilakukan. Selanjutnya implementornya juga mengetahui apa-apa saja yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Edwards III (dalam Agustino, 2006:157-158) mengemukakan tiga variabel di dalam faktor komunikasi yaitu: transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumber Daya (*Resource*),

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan

hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja, Edwards III (1980:11) mengategorikan sumberdaya organisasi terdiri dari *staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies.*

3. Sikap Pelaksana (*Disposition or Attitudes*),

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementornya seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edwards III (dalam Agustino, 2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: penangkatan birokrasi dan insentif.

4. Struktur Birokrasi (*and bureaucratic Structure*).

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Menurut Edwards III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *Standard Operating Procedure (SOP)* dan Fragmentasi.

2 . Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Absensi Sidik Jari (*finger print*) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau ini dilaksanakan

dengan menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan analisa data secara kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan absensi Sidik Jari (*Finger Print*) melalui empat faktor, yakni; faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor sikap pelaksana, dan faktor struktur di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan absensi Sidik Jari (*Finger Print*).

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi memiliki dimensi antara lain; dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan dan konsistensi (Edwards III, 1980:10). Komunikasi merupakan syarat utama dalam implementasi untuk lebih berjalan efektif. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan

tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dan implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Komunikasi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau berkaitan dengan implementasi kebijakan absensi sidik jari sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, dimana koordinasi antara pembuat kebijakan dan Aparatur Sipil Negara sudah mengetahui kebijakan tersebut dan aturan didalamnya. Berkaitan dengan sosialisasi terhadap kebijakan absensi sidik jari sering dilakukan, namun kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan kebijakan tersebut belum dapat dikatakan baik, karena masih sering terjadi pelanggaran terhadap jam masuk dan jam pulang kerja. Karena kebijakan akan berjalan baik jika pihak pelaksana kebijakan menaati aturan yang ada didalamnya.

Selain itu, berkaitan dengan transmisi yang merupakan salah satu proses dalam komunikasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Edwards III (dalam Winarno, 2012:179) bahwa

transmisi merupakan indikator pertama dalam komunikasi kebijakan. Sebelum melakukan sebuah implementasi kebijakan harus disadari suatu keputusan yang telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya yang telah dikeluarkan. Dan berkaitan dengan komunikasi transmisi antara pembuat kebijakan dengan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau memang sudah berjalan dengan baik. tidak dilaksanakan dengan baik antara Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dengan Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Sanggau yang berkaitan dengan komunikasi transmisi yang diaman Badan Kependawaian Daerah Kabupaten Sanggau merasa bahwa Sekretariat Dearah Kabaupaten Sanggau belum pernah memberikan atau menyerahkan rekapitulasi absensi para Aparatur dan hal tersebut sangat menghambat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau dalam mengeluarkan Tunjangan Penghasilan.

Kejelasan merupakan indikator kedua dalam komunikasi dan salah satu juga merupakan hal yang penting dalam melakukan komunikasi yaitu dalam menyampaikan informasi harus jelas agar informasi yang disampaikan mudah dimengerti dan dapat

dilaksanakan, Edwards III (dalam Winarno, 2012:180) menjelaskan bahwa jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk tidak hanya harus diterima oleh para pelaksanan kebijakan tersebut harus jelas. Aparatur Sipil Negara sudah mengetahui dampak positif maupun negatif jika melanggar jam masuk dan jam pulang kerja, namun kesadaran dari Aparatur tesebut yang masih dikatakan kurang, sedangkan dari pembuat kebijakan sudah melakukan monitoring serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan absensi sidik jari tersebut melalui media berupa koran maupun secara langsung saat apel pagi dan sore. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sudah berjalan baik, dan komunikasi dari pembuat kebijakanpun sudah efektif, namun kendalanya kurangnya kesadaran dari Aparatur dalam menaati jam masuk dan jam pulang kerja.

2. Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor terpenting dalam proses implementasi kebijakan, karena pada dasarnya implementasi kebijakan tidak akan berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dukungan sumber daya, yaitu

bagaimana kondisi sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau peneliti melihat bahwa ketersediaan sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan absensi sidik jari ini sudah memadai hanya saja yang menjadi kendalanya adalah kurangnya kesadaran dari sumber daya manusia tersebut dalam menaati jam masuk dan jam pulang kerja. Karena pada dasarnya sumber daya manusia atau staf sangat penting dalam penerapan absensi sidik jari. Faktor penentu lain menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2010:91) yakni sumber daya, walaupun di isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementasinya kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif.

Yang terakhir yakni fasilitas, fasilitas merupakan faktor keempat yang berpengaruh dalam sumber daya. Berdasarkan hasil pengamatan lebih lanjut, peneliti menemukan beberapa

kendala dalam implementasi kebijakan absensi sidik jari ini. Dalam pelaksanaan aplikasi *finger print* merupakan sistem aplikasi yang sangat penting. Oleh karena itu, dari sumber daya manusia (human), dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana juga harus memadai sehingga implementasinya akan berjalan dengan baik. Dan kurangnya koordinasi antara Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dalam rekapitulasi absensi dan hal ini juga berkaitan dengan bagaimana sumber daya manusia yang merekapitulasi absensi di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.

Faktor selanjutnya yang merupakan bagian dari sumber daya menurut Edwards yakni informasi. Sejak diterapkannya kebijakan absensi sidik jari mulai dari Bulan Maret 2014, Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau telah melakukan sosialisasi dengan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau untuk menaati aturan jam masuk dan jam pulang kerja sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kebijakan tersebut dan Aparatur Sipil Negara juga sudah mengetahui aturan didalamnya dan sanksi apa yang akan diberikan jika melanggar kebijakn tersebut. Jadi

terlihat jelas tidak ada masalah dalam penyampaian informasi, namun ini kembali lagi kepada pandangan dari Aparatur Sipil Negara dalam menyikapi kebijakan tersebut dan bagaimana Aparatur Sipil Negara menaatinya sesuai kebijakan yang ada.

Yang terakhir yakni fasilitas, fasilitas merupakan faktor keempat yang berpengaruh dalam sumber daya. Berdasarkan hasil pengamatan lebih lanjut, peneliti menemukan beberapa kendala dalam implementasi kebijakan absensi sidik jari ini. Dalam pelaksanaan aplikasi *finger print* merupakan sistem aplikasi yang sangat penting. Oleh karena itu, dari sumber daya manusia (human), dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasana juga harus memadai sehingga implementasinya akan berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya terlihat bahwa sumber daya manusia (human) yang kurang memiliki kesadaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga akan menghambat kinerja suatu organisasi sedangkan dilihat dari dana serta peralatan teknologi yang ada ini dapat dikatakan sudah cukup memadai. Jadi implementasi kebijakan absensi sidik jari ini berjalan namun sedikit

terhambat oleh sumber daya manusianya.

3. Faktor Disposisi

Edwards III mengungkapkan faktor ketiga dalam model implementasi kebijakan yaitu mengenai disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan absensi sidik jari ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kewajiban dari semua Aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau untuk peningkatan kualitas kinerja yang baik dalam suatu organisasi karena jika tidak adanya tanggungjawab dan kesadaran dari aparatur akan sulit dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasi kebijakan tersebut. Melihat dari pernyataan diatas tidak sesuai dengan hasil pengaman yang peneliti lakukan di Sekretriart Dearah Kupaten Sanggau yang dimana dari pembuat kebijakan maupun yang menjadi penggerak kebijakan sering melakukan pelanggaran terutama

terlambat datang ke kantor dan pulang mendahului.

Sedangkan untuk mengukur masalah insentif untuk menunjang kinerja yang lebih baik, ini tidak ada penambahan tunjangan penghasilan bagi aparatur yang rajin dalam bekerja, dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti hanya menemukan adanya pemotongan tunjangan penghasilan bagi aparatur yang melanggar ketentuan jam masuk dan jam pulang kerja atau tidak masuk tanpa keterangan. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kebijakan dari pembuat kebijakan untuk memberi penghargaan bagi Aparatur yang berprestasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang diungkapkan oleh Edwards III menyangkut dua hal yaitu SOP (*standard operating procedure*) dan fragmentasi. Karena birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Baik secara sadar maupun tidak sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan bersama. Sehingga struktur birokrasi yang terlihat dari manfaat sidik jari itu sangat membantu dan lebih

mempermudah dalam merekap absennya, tetapi masih dikatakan juga bahwa kurangnya kesadaran dari Aparatur Sipil Negara dalam tugasnya menaati jam masuk dan jam pulang kerja dan seharusnya juga diberikan ketentuan jam istirahat agar aparatur istirahat sesuai dengan ketentuan yang ada, karena sering terjadi aparatur yang istirahat melewati batas ketentuan yang ada hal ini menyebabkan tumpang tindih pekerjaan. Dan oleh karena itu seharusnya ada SOP yang menjadi acuan dalam menjalankan sebuah kebijakan. Berdasarkan pernyataan di atas peneliti melihat adanya masalah tentang SOP, karena belum adanya SOP tentang finger print. Yang dimana seharusnya dalam sebuah kebijakan akan lebih baik jika ada SOP sebagai acuan dalam menjalankan sebuah kebijakan.

Sedangkan pada poin fragmentasi yakni berkenaan dengan pembagian tanggungjawab suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam menangani sehingga koordinasi yang baik sangat diperlukan guna mengoptimalkan pelaksanaan suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Adapun pihak yang berwenang untuk menangani absensi sidik jari ini adalah dari pembuat kebijakan dan penggerak kebijakan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan berkaitan dengan fragmentasi bahwa pembagian tanggungjawab tersebut sudah diberikan kepada setiap orang yang dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan analisis data yang telah dikemukakan pada BAB sebelumnya dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Edwards III bahwa implementasi kebijakan di temukan empat faktor yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian serta uraian pembahasan pada BAB sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam implementasi kebijakan absensi sangat diperlukan komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan implementor yang menjalankan kebijakan. Dalam hal komunikasi ada tiga point yang menjadi penilaian yakni transmisi, kejelasan dan

konsistensi. Dan komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan implementornya atau Aparatur Sipil Negara sudah berjalan dengan baik dengan dilakukannya juga sosialisasi terhadap kebijakan jam masuk dan jam pulang kerja namun kendalanya dari Aparatur Sipil Negara kurang menyadari tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan absensi sesuai aturan yang ada sehingga terkadang hal ini yang menjadi kendala. Dan dilain hal komunikasi antara Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau belum berjalan dengan baik, karena Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau belum pernah menyerahkan absensi Aparatur kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau.

2. Pada faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan absensi ditemui beberapa masalah dalam implementasi kebijakan absensi sidik jari (*finger print*) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau diantaranya ialah kualitas sumber daya manusianya yang masih kurang memiliki kesadaran baik itu dari

pimpinan maupun Aparatur yang menjalankan kebijakan tersebut.

3. Pada faktor disposisi yang mana merupakan faktor ketiga dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III. Disposisi atau sikap dari pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan absensi sidik jari agar dapat berjalan efektif karena dalam meningkatkan kualitas organisasi yang baik akan meningkatkan kinerja yang berkualitas. Dalam faktor ketiga ini belum memiliki penghargaan bagi Aparatur yang memiliki prestasi yang baik, namun akan ada pemotongan tunjangan penghasilan jika aparatur melanggar ketentuan jam masuk dan jam pulang kerja.

Dalam implementasi kebijakan absensi sidik jari struktur birokrasi yang berkaitan dengan SOP dan fragmentasi sangat penting. Yang dimana SOP menjadi acuan dalam menjalankan sebuah kebijakan. Namun terlihat di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau belum adanya SOP tentang finger print. Sedangkan berbicara tentang pemberian tanggungjawab, setiap aparatur sudah mengetahui tugasnya masing-masing.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa masukan atau saran kepada pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau agar dapat mencapai peningkatan kualitas dan kinerja organisasi. Berikut adalah saran-saran yang disampaikan:

1. Perlu adanya pendekatan dan sosialisasi kembali kepada Aparatur Sipil Negara akan kebijakan tersebut dan sanksi terhadap pelanggaran jam masuk dan jam pulang kerja dan adanya pengawasan yang melekat dari pembuat kebijakan agar dalam hal ini Aparatur Sipil Negara lebih memiliki motivasi dalam bekerja. Serta dijalinnya komunikasi yang baik antara Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau dalam tupuksinya.
2. Perlu adanya prosedur yang jelas agar dapat meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menaati jam masuk dan jam pulang kerja, baik dari penggerak kebijakan dan yang menjalankan kebijakan.
3. Kemudian staf yang merekapitulasi absensi sidik jari sebaiknya di evaluasi lagi agar memiliki sikap

yang baik dan jujur terhadap tugas yang diembannya, dan memberikan penghargaan untuk aparatur yang berkualitas dalam bekerja dan menaati jam masuk serta jam pulang kerja.

4. Perlu dbuatnya SOP tentang finger print untuk menjadi acuan bagi pelaksana dalam melakukan absensi.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Absensi Sidik Jari Di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau. Peneliti mengalami kendala dimana menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Beberapa informan yang mempunyai kesibukan tugas sehingga sulit ditemui karena tugas Dinas luar atau sedang melaksanakan rapat.
2. Salah satu Instansi yang dituju seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum dapat memberikan informasi secara maksimal sehingga sangat menghambat peneliti dalam mendapatkan data.

G. REFERENSI

Buku Referensi:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

AG Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar

Arifin Tahir, (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. ALFABETA, cv

Hasibuan, Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia* : edisi revisi cetakan kelima. Jakarta : Bumi AKsara.

Islamy, M. Irfan, 2006. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*, jakarta: Bumi Aksara

Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*: PT. Raja Grafindo Persada

Menurut Heriawanto (2004), <http://mesin-absensi.net/mesin-absensi-fingerprint-sidik-jari/>

Menurut Ifa H. Misbach (2010; 47) <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta
(Kurniawan, 2005:109) *Buku Transformasi Pelayanan Publik*

Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Refprmasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : PT.Refika Aditama.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Tachjan, 2006. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publisng.
Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, teori dan proses*: edisi revisi. Yogyakarta: Media presindo

Surat Edaran Bupati Sanggau No: 840/ 209/ BKD-TUK tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau

Skripsi:

Peneliti Erna Maeyasarinim. 082037. ***Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak***. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2012.

Peneliti Kuswahyudi (E21111082). *Implementasi Kebijakan Absensi Sidik Jari (Finger Print) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak*.

Sumber Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Krops dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau pada (Pasal 13) menjelaskan bahwa kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana maksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan pemotongan sebelum dipotong pajak.

Surat Edaran Bupati Sanggau No. 16 Tahun 2011 tentang Ketetuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Hilda Nunung
NIM / Periode Lulus : E42012022 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : nununk.hilda@yahoo.co.id / 082358263163

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI SIDIK JARI (*FINGER PRINT*)
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

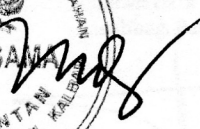
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP

Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A.
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : September 2016


(Hilda Nunung)